KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Pemilu, Mayoritas Fraksi Dukung Opsi Pemerintah
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

RUU Pemilu, Mayoritas Fraksi Dukung Opsi Pemerintah

[JAKARTA] Sebagian besar fraksi dipastikan akan mendukung opsi pemerintah dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Lima fraksi yakni PDI-P, Golkar, Hanura, Nasdem, dan PPP sudah sepakat mendukung *presidential threshold* (Pres-T) 20% suara DPR atau 25% suara nasional. Sementara Fraksi PAN dan Fraksi PKB yang juga partai pendukung pemerintah masih bertahan pada angka Pres-T 10-15%.

"Mudah-mudahan PAN dan PKB bergabung dengan kita karena partai pendukung pemerintah juga. Kita masih terus melakukan lobi hingga paripurna," ujar anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo kepada *SP* di Jakarta, Rabu (19/7).

Anggota Komisi II DPR itu berharap, pengambilan keputusan lima isu krusial pada RUU Pemilu dapat melalui mekanisme musyawarah. Untuk itu, komunikasi antarpimpinan fraksi terus dilakukan intensif agar pengambilan keputusan bukan melalui voting.

"Kami optimistis karena komunikasi dengan kawan-kawan untuk musyawarah mufakat. Kami berupaya musyawarah mufakat," katanya.

Kelima isu krusial tersebut yakni ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi perdaerah pemilihan, dan metode konversi suara. Poin yang alot diperdebatkan soal Pres-T.

5 Opsi RUU Pemilu

Paket A
1. Presidential threshold: 20-25%
2. Parliamentary threshold: 4%
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0%
2. Parliamentary threshold: 4%
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket C
1. Presidential threshold: 10-15%
2. Parliamentary threshold: 4%
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket D
1. Presidential threshold: 10-15%
2. Parliamentary threshold: 5%
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 20-25%
2. Parliamentary threshold: 3,5%
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana juga optimistis PAN dan PKB akan bergabung mendukung usulan pemerintah atau opsi A. Fraksi-fraksi pendukung pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan fraksi lain agar pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Sementara itu, Ketua Pansus yang juga politisi PKB Lukman Edy mengatakan, PKB akan ikut pemerintah dalam UU Pemilu. Namun, kepatuhan PKB dalam mendukung opsi A bukan karena ancaman.

"Opsi PKB itu dengan Pres-T 10-15% menarik kalau tujuannya untuk konsolidasi demokrasi. Memperkecil *presidential threshold*, memperbesar *parliamentary threshold*," katanya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan menjelaskan seluruh fraksi masih terus melakukan komunikasi untuk menyamakan persepsi terkiat pengambilan keputusan di RUU Pemilu. Fraksi PAN sendiri sudah melakukan konsolidasi yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Anggota Pansus RUU Pemilu dari Gerindra Nizar Zahro mengatakan, pihaknya bersama Fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat belum mengambil keputusan apapun terkait 5 opsi dalam rapat paripurna. Gerindra menunggu keputusan opsi A sampai opsi E sebagaimana ditawarkan Pansus.

"Tentunya, beberapa partai politik yang mempunyai fraksi di DPR, sudah mempunyai alasan-alasan tersendiri. Yang menjadi inti permasalahan dari RUU Pemilu ini saya kira hanya Pres-T," ucapnya.

Seperti diketahui, pada Kamis (20/7) ini, rapat paripurna DPR akan menentukan besaran Pres-T menjadi 20% atau tidak. Hal itu juga bisa saja ditetapkan 0% sebagaimana usulan Gerindra. Namun, kata Nizar, apapun keputusan paripurna menjadi keputusan yang tertinggi dan semua pihak, termasuk Gerindra, akan menerima dengan lapang dada. [H-14]